

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung adalah instansi pemerintah yang berperan dalam pengelolaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) di tingkat provinsi. Teknologi informasi dan komunikasi sering digunakan oleh institusi pemerintah, terutama oleh pemerintah daerah. Dengan TIK, pemerintahan daerah dapat meningkatkan kinerja, tanggung jawab, dan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan tata kelola TIK yang baik (Thamrin et al., 2021)

Untuk meningkatkan pelayanan TIK di Pemerintah Provinsi Lampung, pengembangan pada konsultasi TIK perlu dilakukan. Karena saat ini, layanan konsultasi TIK masih berbasis web, yang sering dianggap kurang fleksibel oleh pengguna dalam menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam situasi mendesak yang memerlukan respons cepat. Akibatnya, akses layanan menjadi kurang responsif dan efisien, serta menurunkan tingkat kepuasan pengguna. Aplikasi *web* umumnya memerlukan koneksi internet yang stabil, sering kali memiliki tampilan yang kurang optimal pada berbagai ukuran layar, dan kurang mendukung fitur interaktif seperti *push notifications*, *offline access*, serta integrasi dengan fitur perangkat mobile lainnya.

Mengatasi permasalahan tersebut, dibuatlah sebuah *front-end* konsultasi layanan TIK berbasis *mobile*. *Front-end* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tampilan dari aplikasi yang berinteraksi dengan pengguna, mencakup elemen-elemen seperti *layout*, pemilihan warna, dan tipografi (Dwiyanto & Putro, 2021). Pengembangan *Front-end* berbasis *mobile* dilakukan karena keunggulan dari aplikasi *mobile* yaitu memiliki tampilan yang mudah dimengerti, dapat digunakan kapan saja serta banyak diterapkan pada sistem operasi *android* (Bahri, 2022).

Front-end developer bertanggung jawab untuk mengelola aspek yang terlihat oleh pengguna di perangkat mobile. Ini melibatkan merancang, menganalisis kode,

menangani, dan memperbaiki masalah pada sisi klien dari aplikasi *mobile*, memastikan tampilan dan nuansa aplikasi sesuai dengan yang diharapkan, baik dari segi estetika maupun fungsionalitas. Dalam pengembangan *front-end* ini, Bahasa pemrograman yang digunakan *Kotlin*. *Kotlin* digunakan karena memiliki keunggulan, seperti sintaksis yang lebih sederhana dan mudah dipahami, kemampuan untuk mengelola, dan kemampuan untuk menulis kode berbasis tipe yang lebih aman, *kotlin* telah menjadi favorit pengembang aplikasi *Android*. Selain itu, *Google* mendukung *kotlin* sebagai bahasa pemrograman resmi untuk pengembangan aplikasi *Android* (Rafa et al., 2024)

Diharapkan pengembangan *front-end* pada konsultasi layanan TIK dapat menyediakan akses yang lebih mudah, cepat, dan fleksibel bagi pegawai Diskominfo dalam melakukan konsultasi terkait berbagai layanan TIK. Dengan demikian aplikasi, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja serta kualitas layanan di lingkungan Diskominfo.

1.2. Tujuan

Meningkatkan efisiensi layanan konsultasi TIK dengan pembuatan *front-end* aplikasi *mobile* yang mampu memberikan layanan konsultasi lebih cepat, mudah, dan efektif bagi pegawai Dinas Provinsi Lampung.

II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Profil Diskominfofik Provinsi Lampung

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung merupakan lembaga Pemerintah yang bertugas mengelola dan mengembangkan sistem informasi serta komunikasi di wilayah Provinsi Lampung. Terdapat logo yang menunjukkan identitas dan symbol dari Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Lampung disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Logo Diskominfofik Provinsi Lampung

Sesuai dengan peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 tahun 2021 mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi beserta tatakerja Instansi Daerah, Dinas komunikasi, informasi dan statistik memiliki tugas mendukung dan membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonstrasi dan tugas pembantu serta lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa fungsi utama yang mencakup aspek-aspek penting antara lain.

1. Membuat peraturan pada bidang komunikasi. Informatika dan statistik.
2. Bertanggung jawab melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, memastikan bahwa implementasinya berjalan secara efektif dan sesuai dengan rencana.
3. Bertugas untuk mengevaluasi dan menyusun laporan pada bidang komunikasi. Informatika dan statistik.
4. Mengelola administrasi pada bidang komunikasi. Informatika dan statistik serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

2.2. Visi dan Misi Diskominfo Provinsi Lampung

2.2.1. Visi

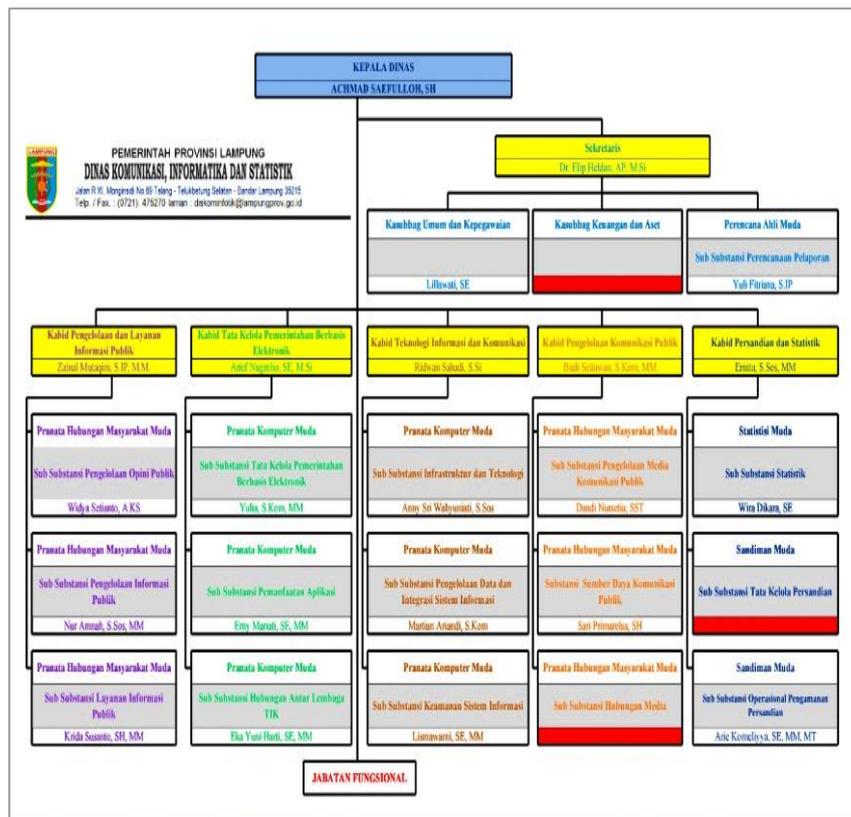
Terwujudnya pusat informasi dan komunikasi untuk menunjang Pembangunan Daerah menuju Lampung unggul dan berdaya saing.

2.2.2. Misi

1. Meningkatkan sumber daya dukungan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi untuk memperluas akses Masyarakat terhadap informasi pembangunan Daerah.
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pada bidang komunikasi dan informatika secara professional.
3. Meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informasi kepada Masyarakat dalam rangka mewujudkan Masyarakat berbudaya informasi.

2.3. Struktur Diskominfo Provinsi Lampung

Struktur organisasi merupakan tata letak dari berbagai komponen atau unit kerja dalam suatu organisasi. Struktur ini menggambarkan pembagian tugas serta bagaimana beragam fungsi atau aktivitas yang berbeda dikoordinasikan (Nafa & Zahro, 2024). Pada gambar 2 terdapat struktur organisasi yang menggambarkan bagaimana susunan organisasi pada Dinas komunikasi, informatika dan statistik (Diskominfo) Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta mengelola, mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi, mencakup berbagai unit dan posisi yang memiliki peran untuk memastikan pelayanan publik dapat berjalan dengan efektif dan efisien.



Gambar 2. Struktur Diskominfotik Provinsi Lampung

Menurut pasal 346 keputusan gubernur nomor 59 tahun 2021 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pemerintah daerah. struktur organisasi biro komunikasi, informatika dan statistik adalah sebagai berikut.

1. Kepala Dinas
2. Seketariat, yang mencakup :
 - Substansi umum dan kepegawaian.
 - Substansi keuangan.
 - Substansi perencanaan
3. Divisi pengelola dan layanan informasi publik, yang mencakup :
 - Substansi pengelola opini publik.
 - Substansi pengelola informasi publik.
 - Substansi layanan informasi publik.
4. Divisi pengelola komunikasi publik, yang mencakup :
 - Substansi pengelola media komunikasi publik
 - Substansi sumber daya komunikasi publik.

- Substansi hubungan media.
5. Divisi teknologi dan informasi, yang mencakup :
 - Substansi infrastruktur dan teknologi.
 - Substansi pengelola data serta integrasi sistem informasi.
 - Substansi keamanan system informasi.
 6. Divisi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, yang mencakup :
 - Substansi Kelola pemerintah berbasis elektronik.
 - Subtansi pemanfaatan aplikasi.
 - Subtansi hubungan antar lembaga Tik.
 7. Divisi Persandian dan Statistik, yang membawahi:
 - Substansi statistik.
 - Substansi tata kelola persandian.
 - Substansi operasional pengamanan persandian.
 8. Jabatan fungsional, terdiri dari bidang keahlian dan keterampilan menurut kelompok masing-masing.

2.4.Tugas pokok Diskominfo Provinsi Lampung

Menurut Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021, bidang dan subbagian di Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Lampung memiliki tanggung jawab berikut.

- A. Kepala dinas bertanggung jawab memimpin, mengarahkan, memantau, dan mengkoordinasikan pengembangan dan penerapan kebijakan, evaluasi, pelaporan, dan petunjuk teknis. Tugas ini akan dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, desentralisasi dan kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan Gubernur sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan.
- B. Sekretariat bertanggung jawab atas urusan surat-menyurat, keuangan, perundang-undangan, dan kepegawaian Selain itu, dia bertanggung jawab atas layanan administrasi yang diberikan kepada seluruh unit di Divisi Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
- C. Divisi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik bertanggung jawab untuk mengembangkan, membangun, dan menerapkan kebijakan. Bidang ini juga bertanggung jawab untuk menyusun standar, prosedur, dan norma. Selain

mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah provinsi dan nasional, tanggung jawab ini mencakup memberikan dukungan teknis, supervisi, observasi, penilaian, dan laporan tentang Pengelolaan Opini Publik, Pengelolaan Informasi Publik, dan Layanan Informasi Publik. Selain itu, tanggung jawab ini juga mencakup menyediakan layanan administratif untuk tugas-tugas Komisi Informasi Provinsi.

- D. Divisi pengelola komunikasi publik Selain menyediakan, merumuskan, dan menerapkan kebijakan, pengelola komunikasi publik bertanggung jawab untuk menyusun standar, prosedur, dan norma. Di antara tanggung jawab ini adalah memberikan dukungan teknis, pengawasan, pengawasan, penilaian, dan laporan tentang pengelolaan komunikasi publik, hubungan media, peningkatan sumber daya komunikasi publik, dan akses informasi provinsi. Selain itu, tanggung jawab ini juga mencakup memberikan layanan administratif yang terkait dengan tugas-tugas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi.
- E. Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki tugas utama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi, Disaster Recovery Center, serta TIK Pemerintah Daerah Provinsi. Selain itu, bidang ini bertanggung jawab atas pengembangan intranet, akses internet, manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik, keamanan informasi *e-Government*, dan sistem komunikasi antar Pemerintah Daerah Provinsi. Tugas-tugas tersebut dijalankan di bawah kepemimpinan seorang Kepala Bidang yang melapor langsung kepada Kepala Dinas.
- F. Divisi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, serta kriteria yang relevan. Tugasnya juga meliputi pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan. Bidang ini mengelola integrasi elemen spesifik dan tambahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama subdomain untuk lembaga, pelayanan publik, kegiatan, serta penyelenggaraan posisi *Government Chief Information Officer (GCIO)* di tingkat Pemerintah

Daerah Provinsi. Selain itu, bidang ini juga fokus pada pengembangan sumber daya TIK bagi pemerintah daerah dan masyarakat di provinsi.

G. Divisi persandian dan statistika bertanggung jawab atas pembuatan dan penerapan kebijakan daerah dalam bidang Persandian dan Statistik.